



Curriculum policy and dynamics of character education strengthening in Indonesia

Bayu Trie Rahayu

Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

bayutr010605@upi.edu

ABSTRACT

This research is motivated by the Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), a national curriculum policy innovation integrated with the mental revolution agenda. This policy gave rise to a discourse on character crisis that became the basis for legitimizing changes to the education curriculum in Indonesia. This study aims to analyze how the construction of knowledge and power relations works in the formation of PPK policy through Michel Foucault's governmental perspective. The method used is qualitative research based on literature reviews, a genealogical approach, and analysis of educational policy documents. The results show that PPK is formed through the production of a moral crisis discourse that serves as a basis for policy legitimacy and operates through government mechanisms that direct individuals to internalize character values such as religiosity, nationalism, independence, cooperation, and integrity. The implementation of PPK is not only pedagogical, but also becomes a technology of power that shapes subjects through the normalization of values in the school environment. This study concludes that PPK policy is a practice of power that operates productively through knowledge, discourse, and the shaping of individual behavior within the national education system.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 21 Apr 2026

Revised: 24 Aug 2026

Accepted: 1 Sep 2026

Publish online: 10 Sep 2026

Keywords:

character education; curriculum discourse; governmentality Michel Foucault; national curriculum

Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari inovasi kebijakan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan agenda revolusi mental. Kebijakan tersebut memunculkan wacana tentang karakter krisis yang menjadi dasar legitimasi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi pengetahuan dan hubungan kekuasaan bekerja dalam pembentukan kebijakan PPK melalui perspektif pemerintahan Michel Foucault. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan genealogis dan analisis dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK dibentuk melalui produksi wacana krisis moral yang berfungsi sebagai legitimasi kebijakan, serta bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mengarahkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Implementasi PPK tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga menjadi teknologi kekuasaan yang membentuk subjek melalui normalisasi nilai di lingkungan sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPK merupakan praktik kekuasaan yang bekerja secara produktif melalui pengetahuan, wacana, dan pembentukan perilaku individu dalam sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: formasi diskursif; governmentality Michel Foucault; karakter pendidikan; kurikulum nasional

How to cite (APA 7)

Rahayu, B. T. (2026). Curriculum policy and dynamics of character education strengthening in Indonesia. *Inovasi Kurikulum*, 23(3), 763-774.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

Copyright



2026, Bayu Trie Rahayu. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: bayutr010605@upi.edu

INTRODUCTION

Pendidikan sebagai salah satu instrumen strategis yang berperan penting dalam membentuk kualitas individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, negara tidak hanya mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai, norma, dan orientasi perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Faruq & Bakar, 2025; Rokhmah & Siregar, 2025). Oleh karena itu, pendidikan selalu menjadi sektor yang memperoleh perhatian besar dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan pembaruan kurikulum (Fangestu & Marpuah, 2025). Dalam konteks Indonesia, salah satu kebijakan yang mendapat perhatian luas adalah Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia.

Kebijakan PPK memperoleh momentum yang kuat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui program Revolusi Mental yang menempatkan pembangunan karakter sebagai prioritas nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pemerintah berupaya membentuk murid yang memiliki nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas (Fikri *et al.*, 2022; Samputra & Satrio, 2021). Program ini diposisikan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan moral yang dianggap menghambat kemajuan bangsa. Dalam implementasinya, PPK tidak hanya hadir sebagai program pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan kebijakan kurikulum dan tata kelola pendidikan (Rahmadani & Al Hamdany, 2023).

Penelitian mengenai PPK menunjukkan bahwa kebijakan ini diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya membentuk karakter murid sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Suanto & Nurdiana, 2020). Penelitian lain menemukan bahwa keberhasilan PPK dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat serta berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku murid (Yulianto *et al.*, 2020). Selain itu, PPK merupakan bagian penting dari reformasi pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum nasional (Fikri *et al.*, 2022). Dari perspektif yang lebih kritis, pendidikan karakter dipandang sebagai instrumen negara untuk menanamkan nilai-nilai moral pada warga negara (Syahputra & Maida, 2021).

Sejalan dengan itu, kebijakan PPK tidak hanya berfungsi sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme kekuasaan yang membentuk individu agar secara sukarela menginternalisasi nilai dan norma yang ditetapkan oleh negara (Ariandy, 2019). Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi dan peran PPK dalam pendidikan nasional, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas program, strategi pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter murid. Kajian yang secara khusus menganalisis PPK sebagai praktik kekuasaan yang bekerja melalui konstruksi pengetahuan, produksi wacana, dan mekanisme pengaturan perilaku dalam kerangka *governmentality* Michel Foucault masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kebijakan PPK sebagai objek kajian kritis untuk mengungkap relasi antara pendidikan, kekuasaan, dan pembentukan subjek dalam kebijakan kurikulum nasional. Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana aktor-aktor yang memiliki otoritas dalam bidang pendidikan memanfaatkan konstruksi pengetahuan tentang perubahan kurikulum dan urgensi pendidikan karakter untuk membentuk serta melegitimasi kebijakan PPK. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja melalui kebijakan PPK dalam mengarahkan perilaku, membentuk norma, dan menghasilkan subjek pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPK melalui perspektif *governmentality* Michel Foucault dengan menelusuri proses pembentukan wacana, relasi kekuasaan, dan mekanisme pengaturan perilaku yang bekerja di balik kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kritis mengenai hubungan antara pendidikan dan kekuasaan dalam kebijakan kurikulum nasional, sekaligus memperkaya kajian tentang pendidikan karakter dari perspektif studi kebijakan dan teori sosial kritis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap keragaman sosial.

LITERATURE REVIEW

Pendidikan, Kekuasaan, dan *Governmentality* Michel Foucault

Michel Foucault memandang kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara atau institusi tertentu, melainkan sebagai relasi yang tersebar dalam berbagai praktik sosial dan bekerja melalui produksi pengetahuan, norma, serta wacana yang diterima sebagai kebenaran (Adam & Kamaruddin, 2024; Portschy, 2020). Dalam perspektif ini, pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling membentuk *power/knowledge*, sehingga kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, tidak dapat dipahami sebagai instrumen administratif yang netral, melainkan sebagai mekanisme yang memproduksi cara berpikir dan bertindak individu dalam masyarakat (Anderson & Holloway, 2020; Pitsoe & Vlăduțescu, 2024). Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu arena penting bagi negara untuk membentuk subjek yang sesuai dengan nilai dan tujuan yang diinginkan (Siswadi, 2024).

Salah satu konsep penting yang dikembangkan Foucault adalah *governmentality*, yaitu cara negara mengelola populasi melalui mekanisme yang tidak selalu bersifat koersif, tetapi bekerja melalui pembentukan kesadaran, pengaturan perilaku, dan internalisasi norma (Jessen & von Eggers, 2020; Paraná et al., 2026). Melalui mekanisme ini, individu didorong untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan standar yang telah dikonstruksi sebagai sesuatu yang benar dan ideal. Dalam konteks pendidikan, kebijakan kurikulum, sistem evaluasi, serta berbagai program pembentukan karakter dapat dipahami sebagai teknologi pemerintahan yang membentuk murid menjadi subjek yang patuh terhadap norma yang telah ditetapkan (Cholifah, 2024; Nur et al., 2023; Rafillah, 2025).

Selain konsep *governmentality*, Foucault juga mengembangkan pendekatan genealogi untuk menelusuri bagaimana suatu pengetahuan atau kebijakan terbentuk melalui proses historis, pertarungan wacana, dan relasi kekuasaan yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini tidak berupaya menemukan asal-usul tunggal suatu fenomena, melainkan mengungkap berbagai kepentingan, praktik, dan kondisi yang memungkinkan suatu kebijakan muncul serta diterima sebagai sesuatu yang normal dan sah (Castro-Gómez et al., 2023; Guizzo, 2021; Portschy, 2020). Oleh karena itu, pendekatan genealogis relevan untuk memahami proses terbentuknya kebijakan PPK dalam konteks dinamika politik pendidikan di Indonesia.

PPK sebagai Kebijakan Pendidikan

Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda strategis dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan membentuk murid agar memiliki nilai moral, etika, dan kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Program PPK diperkuat secara formal melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kebijakan ini menempatkan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas sebagai nilai utama yang perlu dikembangkan pada diri

murid (Attruk *et al.*, 2024; Fitrah *et al.*, 2024; Sakban & Sundawa, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter telah menjadi bagian integral dari kurikulum nasional. Pendidikan karakter diterapkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk membentuk perilaku dan sikap murid sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Gunawan *et al.*, 2020).

Selain itu, pendidikan karakter telah diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Ngasa, 2025). Di sisi lain, pendidikan karakter tidak hanya dipahami sebagai instrumen pedagogis, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan perilaku sosial. Pendidikan karakter berperan dalam membentuk perilaku generasi muda agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap ideal oleh masyarakat dan negara (Asad & Fridiyanto, 2020). Demikian, pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga dengan pembentukan warga negara yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh agensi guru dalam menafsirkan, memilih, dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam praktik pembelajaran (Maulana, 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan karakter tidak selalu diterapkan secara seragam, melainkan melalui proses negosiasi dan interpretasi di tingkat sekolah. Dari perspektif yang lebih kritis, pendidikan karakter mulai dipahami sebagai bagian dari praktik kekuasaan yang bekerja melalui konstruksi nilai dan norma sosial. Pendidikan karakter dalam kurikulum nasional tidak dapat dilepaskan dari proses konstruksi nilai yang dilegitimasi melalui kebijakan pendidikan (Alhamuddin, 2024). Sejalan dengan itu, pendidikan karakter juga dipandang sebagai instrumen negara untuk menanamkan nilai-nilai moral pada warga negara (Murtiningsih *et al.*, 2024). Bahkan, kebijakan PPK tidak hanya berfungsi sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme kekuasaan yang membentuk individu agar secara sukarela menginternalisasi nilai dan norma yang ditetapkan oleh negara (Zaharah *et al.*, 2023).

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dalam paradigma *critical qualitative research*. Paradigma ini digunakan karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan kebijakan PPK, tetapi juga mengungkap relasi kuasa, konstruksi pengetahuan, dan proses normalisasi yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif kritis berorientasi pada kajian terhadap struktur sosial, ideologi, dan mekanisme kekuasaan yang membentuk suatu fenomena sosial (Levitt *et al.*, 2021). Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan dengan kebijakan PPK. Dokumen primer meliputi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Kurikulum 2013, Naskah Gerakan Nasional Revolusi Mental, serta berbagai peraturan dan pedoman pelaksanaan PPK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dokumen sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, berita media massa, dan dokumen publik lainnya yang membahas pembentukan maupun implementasi kebijakan PPK. Pemilihan dokumen dilakukan secara *purposive* berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, yaitu dokumen yang memuat informasi mengenai proses pembentukan kebijakan, perubahan kebijakan dari *Full Day School* (FDS) menuju PPK, implementasi nilai-nilai karakter dalam pendidikan, serta respons berbagai aktor terhadap kebijakan tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan genealogi Michel Foucault untuk menelusuri proses historis, pertarungan wacana, serta relasi kuasa yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan PPK. Analisis diawali dengan pengumpulan dan penelaahan berbagai dokumen yang telah dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut

dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan wacana pendidikan karakter, relasi kuasa, proses normalisasi, serta pembentukan subjek dalam kebijakan pendidikan.

Tema-tema yang ditemukan kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif genealogi guna mengungkap kondisi historis, kepentingan, dan dinamika wacana yang memungkinkan kebijakan PPK muncul serta memperoleh legitimasi dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahap berikutnya, konsep *governmentality* digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan PPK berfungsi sebagai teknologi pemerintahan yang mengarahkan perilaku individu melalui internalisasi nilai-nilai karakter yang dianggap ideal. Melalui proses analisis tersebut, penelitian berupaya menjelaskan mekanisme kekuasaan yang bekerja dalam pembentukan dan implementasi kebijakan PPK serta implikasinya terhadap pembentukan subjek dalam pendidikan. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai dokumen kebijakan, publikasi akademik, dan dokumen pendukung lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi kebijakan PPK, sekaligus meminimalkan bias interpretasi dalam proses analisis data.

RESULTS AND DISCUSSION

Pembentukan Wacana PPK dalam Dokumen Kebijakan Nasional

Hasil analisis terhadap Naskah Gerakan Nasional Revolusi Mental, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dan dokumen Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa kemunculan PPK tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan karakter bangsa yang menjadi prioritas pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam dokumen Gerakan Nasional Revolusi Mental, pembangunan karakter ditempatkan sebagai strategi untuk membentuk masyarakat yang berintegritas, beretos kerja, dan memiliki semangat gotong royong. Wacana tersebut kemudian diadopsi ke dalam sektor pendidikan melalui kebijakan PPK yang menempatkan sekolah sebagai instrumen utama dalam pembentukan karakter warga negara. Analisis dokumen Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan lima nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak hanya diposisikan sebagai tujuan pendidikan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku murid sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan negara. Selain itu, berbagai dokumen resmi Kemendikbud menunjukkan bahwa implementasi PPK dipromosikan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan moral yang dianggap terjadi di kalangan generasi muda. Narasi mengenai menurunnya moralitas, meningkatnya perilaku menyimpang, serta kebutuhan akan penguatan identitas kebangsaan secara konsisten muncul dalam berbagai dokumen kebijakan. Temuan ini menunjukkan adanya konstruksi pengetahuan yang menempatkan pendidikan karakter sebagai jawaban yang dianggap paling tepat atas berbagai persoalan sosial tersebut.

Genealogi Kebijakan PPK dari Wacana FDS

Hasil penelusuran dokumen kebijakan dan pemberitaan media menunjukkan bahwa lahirnya PPK memiliki keterkaitan erat dengan polemik kebijakan FDS yang sebelumnya muncul. Pada fase awal implementasinya, kebijakan FDS mendapatkan berbagai bentuk persetujuan dari masyarakat, organisasi keagamaan, serta lembaga pendidikan nonformal karena dianggap berpotensi menggeser peran pendidikan berbasis komunitas, seperti madrasah diniyah, serta mengurangi ruang sosial-keagamaan bagi murid di luar sekolah formal. Penolakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis, karena menyangkut cara pandang terhadap peran negara dalam mengatur waktu dan ruang

pendidikan. Analisis terhadap berbagai dokumen publik menunjukkan bahwa resistensi terhadap FDS kemudian diikuti oleh pergeseran arah kebijakan pemerintah menuju narasi penguatan karakter dalam pendidikan. Pergeseran ini terlihat dari semakin dominannya istilah "*karakter pendidikan*" dalam dokumen kebijakan resmi dibandingkan dengan istilah FDS yang secara bertahap mengalami penurunan intensitas wacana.

Meskipun demikian, substansi kebijakan yang berkaitan dengan intensifikasi aktivitas sekolah, penguatan kontrol terhadap perilaku murid, serta perluasan fungsi pendidikan tetap dipertahankan dalam skema PPK. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi proses penyusunan ulang kebijakan, bukan penghapusan substansi secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tidak terjadi secara linier dan teknokratis, melainkan melalui proses negosiasi, kompromi, serta pertarungan wacana yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan di ruang publik. Dalam perspektif ini, kebijakan PPK dapat dipahami sebagai hasil konfigurasi ulang wacana pendidikan yang berupaya menjaga keinginan pembentukan karakter, namun dalam bentuk yang lebih dapat diterima secara sosial dan politik. Dengan demikian, lahirnya PPK tidak hanya mencerminkan perubahan istilah kebijakan, tetapi juga mentransformasikan legitimasi strategi dalam tata kelola pendidikan nasional.

Mekanisme Pengaturan Perilaku dalam Implementasi PPK

Analisis terhadap pedoman pelaksanaan PPK menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran sentral dalam proses internalisasi nilai-nilai karakter pada murid. Nilai-nilai karakter tidak hanya disampaikan melalui proses pembelajaran formal di dalam kelas, tetapi juga diintegrasikan ke dalam budaya sekolah, tata tertib, kegiatan ekstrakurikuler, serta sistem penilaian sikap dan karakter. Integrasi ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai praktik pendidikan yang saling terhubung dalam ekosistem sekolah. Selain itu, dokumen implementasi PPK menunjukkan bahwa guru menduduki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan sekaligus aktor utama dalam pembentukan karakter murid. Peran guru tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga mencakup pelatihan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perilaku murid dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran instrumen penilaian karakter dalam berbagai dokumen sekolah menunjukkan bahwa aspek afektif dan perilaku memperoleh porsi yang signifikan dalam proses pendidikan, sehingga guru berfungsi sekaligus sebagai pendidik akademik dan pengarah perilaku sosial murid. Temuan lainnya menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan karakter dalam PPK bekerja melalui proses pembiasaan yang terus-menerus serta internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Peserta didorong untuk tidak hanya memahami nilai-nilai yang diajarkan, tetapi juga mengaktualisasikannya hingga menjadi bagian dari kebiasaan dan identitas diri. Dengan demikian, kebijakan PPK tidak hanya mengatur dimensi kognitif pembelajaran, tetapi juga membentuk standar perilaku serta subjektivitas murid yang dianggap ideal dalam kerangka pendidikan nasional.

Normalisasi Nilai Karakter dalam Wacana Pendidikan

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa nilai-nilai PPK telah terintegrasi secara luas dalam berbagai regulasi, panduan pendidikan, program sekolah, serta materi pelatihan bagi guru. Kehadiran nilai karakter secara berulang dalam berbagai dokumen menunjukkan bahwa nilai tersebut telah menjadi bagian dari kerangka berpikir yang dominan dalam pendidikan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya proses normalisasi terhadap nilai-nilai yang dipromosikan melalui kebijakan PPK. Selain ditemukan dalam dokumen resmi pemerintah, wacana mengenai pentingnya pendidikan karakter juga muncul dalam berbagai publikasi media massa dan pernyataan pejabat negara. Sebagian besar narasi yang

berkembang menggambarkan pendidikan karakter sebagai kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan sosial dan perkembangan zaman. Narasi tersebut memperkuat legitimasi kebijakan PPK sebagai kebijakan yang dianggap penting dan relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan PPK tidak hanya beroperasi melalui regulasi formal, tetapi juga melalui produksi wacana yang membentuk pemahaman masyarakat tentang pendidikan yang ideal. Dengan demikian, nilai-nilai karakter memperoleh legitimasi yang kuat dan diterima sebagai bagian yang wajar dalam sistem pendidikan nasional.

Discussion

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemunculan kebijakan PPK didahului oleh konstruksi wacana mengenai krisis moral generasi muda, degradasi karakter bangsa, serta pentingnya pembangunan karakter nasional. Wacana tersebut kemudian menjadi dasar legitimasi bagi lahirnya kebijakan yang menempatkan pendidikan karakter sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan pendidikan. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada implementasi dan efektivitas PPK dalam sistem pendidikan nasional (Fikri *et al.*, 2022; Suanto & Nurdiana, 2020; Yulianto *et al.*, 2020). Berbeda dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi program pendidikan, PPK terlebih dahulu dibangun melalui produksi pengetahuan yang mendefinisikan adanya persoalan sosial tertentu yang harus diselesaikan melalui intervensi pendidikan. Dalam perspektif *power/knowledge*, pengetahuan mengenai “*krisis karakter*” tidak hadir secara netral, melainkan berfungsi sebagai dasar yang memungkinkan lahirnya mekanisme pengaturan sosial melalui kebijakan pendidikan (Adam & Kamaruddin, 2024; Anderson & Holloway, 2020; Portschy, 2020).

Demikian, kebijakan PPK dapat dipahami sebagai hasil dari relasi antara pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk cara masyarakat memahami persoalan karakter serta solusi yang dianggap sah untuk mengatasinya. Temuan mengenai keterkaitan antara Gerakan Nasional Revolusi Mental dan PPK menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membentuk warga negara sesuai dengan visi pembangunan nasional. Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pedagogis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nilai-nilai sosial dan moral yang dianggap ideal oleh negara (Asad & Fridiyanto, 2020; Syahputra & Maida, 2021). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan karakter berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai dan norma yang dilegitimasi melalui kebijakan negara (Alhamuddin, 2024; Zaharah *et al.*, 2023).

Dalam perspektif *governmentality*, proses tersebut menunjukkan bagaimana negara mengatur populasi tidak hanya melalui regulasi formal, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran, pengelolaan perilaku, dan internalisasi nilai tertentu sehingga individu terdorong untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Jessen & von Eggers, 2020; Paran  *et al.*, 2026). Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan modern bekerja melalui mekanisme pembentukan subjektivitas yang memungkinkan individu secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan tujuan institusional dan sosial yang dianggap ideal (Shoshana, 2022). Oleh karena itu, integrasi nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas dalam PPK dapat dipahami sebagai teknologi pemerintahan yang berupaya membentuk subjek pendidikan sesuai dengan orientasi pembangunan nasional. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPK dilakukan melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Temuan tersebut memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan karakter telah menjadi bagian integral dari kurikulum nasional dan dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pembelajaran maupun budaya sekolah (Gunawan *et al.*, 2020; Ngasa, 2025; Suanto & Nurdiana, 2020). Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa integrasi nilai karakter

tidak hanya memiliki fungsi pedagogis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme normalisasi. Melalui proses pembelajaran, pembiasaan, penilaian sikap, dan budaya sekolah, murid diarahkan untuk menyesuaikan perilakunya dengan standar moral yang dianggap ideal. Dalam perspektif Foucauldian, proses ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja secara produktif melalui pembentukan kebiasaan, penciptaan norma, dan pengaturan perilaku sehari-hari tanpa harus mengandalkan paksaan secara langsung. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan PPK dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk perilaku murid (Yulianto *et al.*, 2020). Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengendalian perilaku tersebut berlangsung melalui mekanisme yang lebih kompleks daripada sekadar koordinasi antar aktor. Melalui pembiasaan, evaluasi karakter, budaya sekolah, dan penguatan nilai dalam aktivitas pendidikan, murid didorong untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai *governmentality* dalam pendidikan yang menunjukkan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui kombinasi mekanisme disipliner dan pengaturan diri (*self-government*), sehingga individu secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh institusi (Han, 2023). Dengan demikian, efektivitas PPK tidak hanya terletak pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada keberhasilannya membentuk subjek yang menginternalisasi nilai-nilai karakter sebagai bagian dari identitasnya. Dari perspektif genealogi, transformasi kebijakan dari FDS menuju PPK memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses negosiasi, resistensi, dan pertarungan wacana yang berlangsung dalam ruang sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan pendidikan tidak lahir secara linier maupun alamiah, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kepentingan, aktor, dan relasi kuasa yang membentuk arah kebijakan publik (Castro-Gómez *et al.*, 2023; Guizzo, 2021; Portschy, 2020).

Penolakan terhadap kebijakan FDS mendorong pemerintah untuk mereposisi kebijakan melalui PPK yang memiliki substansi serupa, tetapi memperoleh legitimasi yang lebih luas karena dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan karakter bangsa. Temuan ini juga mendukung penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter selalu melibatkan proses negosiasi dan interpretasi dalam praktik pendidikan (Maulana, 2022). Oleh karena itu, lahirnya PPK dapat dipahami sebagai hasil transformasi wacana yang memungkinkan agenda pembentukan karakter tetap dijalankan dalam bentuk yang lebih dapat diterima oleh berbagai kelompok sosial. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK berperan dalam proses pembentukan identitas warga negara yang dianggap ideal oleh negara. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang memandang pendidikan karakter sebagai instrumen pembentukan warga negara yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional (Asad & Fridiyanto, 2020; Murtiningsih *et al.*, 2024).

Dalam konteks tersebut, murid dikonstruksikan sebagai individu yang religius, berintegritas, mandiri, nasionalis, serta memiliki tanggung jawab sosial. Kajian kontemporer mengenai tata kelola pendidikan juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya mengatur proses belajar, tetapi juga turut membentuk kategori-kategori subjek yang dianggap sesuai dengan tujuan sosial dan politik tertentu (Wilkins & Gobby, 2024). Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran nilai, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan identitas sosial dan kewarganegaraan yang selaras dengan visi negara tentang warga negara yang ideal. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang berfokus pada efektivitas penerapan karakter pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan juga perlu dipahami sebagai praktik kekuasaan yang bekerja melalui produksi pengetahuan, pembentukan wacana, normalisasi nilai, dan pembentukan subjek (Fikri *et al.*, 2022; Gunawan *et al.*, 2020; Suanto & Nurdiana, 2020). Demikian, penelitian ini memperluas kajian karakter pendidikan dengan menempatkannya dalam perspektif kebijakan pendidikan dan teori sosial kritis.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan refleksi bahwa penyusunan kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan keberagaman konteks sosial dan budaya masyarakat serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan pendidikan yang disusun secara partisipatif berpotensi mengurangi dominasi satu perspektif tertentu dalam mendefinisikan karakter ideal warga negara serta memungkinkan terjadinya dialog yang lebih demokratis mengenai tujuan pendidikan nasional. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis dilakukan berdasarkan studi dokumentasi sehingga belum mampu menggambarkan secara langsung pengalaman guru, murid, maupun pembuat kebijakan dalam implementasi PPK di lapangan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada dokumen kebijakan tingkat nasional sehingga belum menjelaskan variasi implementasi PPK pada tingkat daerah maupun satuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan analisis dokumen dengan wawancara mendalam, observasi, atau studi kasus di sekolah tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kekuasaan dalam implementasi pendidikan karakter.

CONCLUSION

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan PPK melalui perspektif *governmentality* Michel Foucault, penelitian ini menemukan bahwa PPK tidak hanya merupakan program pendidikan untuk membentuk karakter murid, tetapi juga hasil konstruksi pengetahuan, produksi wacana, dan relasi kekuasaan dalam politik pendidikan nasional. Analisis genealogis menunjukkan bahwa kebijakan ini diawali oleh wacana krisis moral generasi muda dan degradasi karakter bangsa yang berfungsi sebagai rezim kebenaran dalam melegitimasi PPK. Temuan ini juga menunjukkan bahwa transformasi dari FDS menuju PPK merupakan hasil negosiasi, resistensi, dan pertarungan wacana antar aktor dalam ruang sosial-politik pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa PPK berfungsi sebagai teknologi *governmentality* yang menginternalisasikan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas melalui praktik pembelajaran, budaya sekolah, pembiasaan, serta evaluasi karakter.

Mekanisme tersebut mendorong murid untuk melakukan pengawasan diri sesuai standar yang ditetapkan negara, sehingga kekuasaan bekerja secara produktif melalui internalisasi nilai, bukan melalui paksaan secara langsung. Demikian, pendidikan karakter tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga menjadi mekanisme pembentukan subjek dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan produk sosial-politik yang tidak bebas dari relasi kuasa dan produksi pengetahuan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan perlu lebih partisipatif, demokratis, dan berbasis pada kebutuhan nyata agar tidak hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga mendorong kesadaran kritis murid. Namun, penelitian ini terbatas pada studi dokumentasi sehingga belum menangkap pengalaman aktor di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan, seperti wawancara, observasi, atau studi kasus.

AUTHOR'S NOTE

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademisi, praktisi pendidikan, serta semua pihak yang telah mendorong tumbuhnya budaya kritik dan keberanian intelektual di tengah dominasi narasi resmi. Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Adam, A., & Kamaruddin, S. A. (2024). Power, knowledge, and language hegemony from the perspective of Michel Foucault. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(1), 101-108.
- Alhamuddin, A. (2025). Islamic character education in Indonesian national curricula: a critical policy analysis of the 2013 and Merdeka frameworks. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 27-38.
- Anderson, K. T., & Holloway, J. (2020). Discourse analysis as theory, method, and epistemology in studies of education policy. *Journal of Education Policy*, 35(2), 188-221.
- Ariandy, M. (2019). Kebijakan kurikulum dan dinamika penguatan pendidikan karakter di Indonesia. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 137-168.
- Asad, A., & Fridiyanto, F. (2020). Managing young human resource behaviors through character education. *Indonesian Research Journal in Education (IRJE)*, 4(2), 530-542.
- Attruk, M. F. H., A'yun, Q., & Mujahidah, N. U. (2024). Implementation of character education in higher education: strategies, challenges, and impact. *Educatum: Scientific Journal of Education*, 2(3), 82-87.
- Castro-Gómez, S., Kopsick, K., & Golding, D. (2023). Michel Foucault and the coloniality of power. *Cultural Studies*, 37(3), 444-460.
- Cholifah, S. (2024). Educational environment in the implementation of character education. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 3(2), 816-825.
- Fangestu, I. W. F., & Marpuah, S. (2025). Perubahan dan inovasi kurikulum pendidikan di berbagai negara. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 1-20.
- Faruq, U., & Bakar, M. Y. A. (2025). Pendidikan sebagai alat transformasi sosial perspektif filsafat ilmu. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(1), 56-74.
- Fikri, S. H., Panji, W. R. W. R., & Fitriah, E. L. (2023). Urgensi pelaksanaan pendidikan karakter yang terintegrasi: analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(1), 45-56.
- Fitrah, M., Umar, U., Jayanti, M. I., & Syafruddin, S. (2024). Penguatan pendidikan karakter di Indonesia: landasan filosofis dan yuridis dalam membentuk generasi yang berkarakter. *El-Muhbib Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(2), 378-393.
- Guizzo, D. (2021). Reassessing Foucault: Power in the history of political economy. *International Journal of Political Economy*, 50(1), 60-74.
- Gunawan, I., Rusdarti, R., & Ahmadi, F. (2020). Implementation of character education for elementary students. *Journal of Primary Education*, 9(2), 168-175.
- Han, X. (2023). Disciplinary power matters: rethinking governmentality and policy enactment studies in China. *Journal of Education Policy*, 38(3), 408-431.

- Jessen, M. H., & von Eggers, N. (2020). Governmentality and statification: Towards a Foucauldian theory of the state. *Theory, Culture & Society*, 37(1), 53-72.
- Levitt, H. M., Morrill, Z., Collins, K. M., & Rizo, J. L. (2021). The methodological integrity of critical qualitative research: Principles to support design and research review. *Journal of Counseling Psychology*, 68(3), 357–370.
- Maulana, M. I. (2022). Teachers' enactments of character education: A case study from Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(2), 123-132.
- Murtiningsih, I., Untari, A. D., & Luthfi, Z. F. (2024). Membangun karakter bangsa: peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan generasi berkualitas. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 86-95.
- Ngasa, G. J. (2025). Evaluasi program pendidikan karakter pelajar abad 21 di sekolah menengah. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 172-187.
- Nur, A. A. J., Gunawan, W., Zakaria, S., Yunita, D., & Lesmana, A. C. (2023). Pengawasan terhadap masyarakat: panopticon dan post-panopticon (Analisis diferensiasi pemikiran Michel Foucault-Deleuze & Guattari). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 7(2), 178-194.
- Paraná, E., Trindade, L., & Pimenta, A. M. (2026). From Althusser to Foucault and back: State, discipline and governmentality in the crisis of neoliberalism. *Historical Materialism*, 1(1), 1-38.
- Pitsoe, V. J., & Vlăduțescu, Ș. (2024). A critical analysis of Foucault's power and knowledge in higher education research'. *Social Sciences and Education Research Review*, 11(1), 41-51.
- Portschy, J. (2020). Times of power, knowledge and critique in the work of Foucault. *Time & Society*, 29(2), 392-419.
- Rafillah, R. A. (2025). Wacana kuasa ala Foucault atas peran negara dan institusi dalam melanggengkan ketimpangan kuasa pada anak perempuan korban kekerasan seksual di Pontang, Serang. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 01-22.
- Rahmadani, E., & Al Hamdany, M. Z. (2023). Implementasi nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah dasar. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 10-20.
- Rokhmah, U. N., & Siregar, T. E. (2025). Integrasi nilai, moral, dan norma dalam pendidikan dasar: strategi dan implementasi dalam pembentukan karakter siswa. *An-Nashr: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 3(2), 53-67.
- Sakban, A., & Sundawa, D. (2023). Character education: Direction and priority for national character development in Indonesia. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 9(3), 794-807.
- Samputra, P. L., & Satrio, M. A. (2021). Strengthening Pancasila characters through the role of mosque youth organizations: A mixed method study. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 8(2), 177-202.
- Shoshana, A. (2022). Affective governmentality through gratitude: Governmental rationality, education, and everyday life. *Critical Studies in Education*, 63(4), 436-450.

- Siswadi, G. A. (2024). Relasi kuasa terhadap konstruksi pengetahuan di sekolah perspektif Michel Foucault dan refleksi atas sistem pendidikan di Indonesia. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 5(1), 1-15.
- Suanto, S., & Nurdiana, N. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 107-114.
- Syahputra, M. C., & Maida, N. (2021). Penguatan pendidikan karakter: Dari kebijakan publik untuk kebijakan publik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 25-39.
- Wilkins, A., & Gobby, B. (2024). Objects and subjects of risk: A governmentality approach to education governance. *Globalisation, Societies and Education*, 22(5), 915-928.
- Yulianto, D., Sayekti, L. A., & Sugiyanto, S. (2020). Evaluasi program penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(2), 103-112.
- Zaharah, F., Husna, M., Sa'bani, N., Aminah, S., & Luthfiyyah, S. (2023). Implementasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SD Al-Rasyid Pekanbaru. *Jurnal Islamika*, 6(2), 149-159.